

PENGUATAN KELEMBAGAAN BUMDES DESA COKRO MELALUI REORGANISASI DAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI

Amidi¹, Budi Prasetyo², Detalia Noriza Munahefi³, Adi Satrio Ardiansyah⁴

¹Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, amidi@mail.unnes.ac.id

²Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, bprasetyo@mail.unnes.ac.id

³Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, detalia@mail.unnes.ac.id

⁴Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, adisatrio@mail.unnes.ac.id

Disubmit : 14/08/25 | Diterima : 09/09/25 | Diterbitkan : 09/09/25

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a strategic role in strengthening economic independence and optimizing local village potential. However, in various regions, including Cokro Village, Tulung District, Klaten Regency, several BUMDes have experienced institutional stagnation, resulting in the suboptimal functioning of their organizations. One such example is BUMDes Tirta Kencana, which had been inactive due to weak organizational structure and management. This community service activity aimed to reactivate the BUMDes through an institutional strengthening strategy based on reorganization and organizational structure arrangement. The implementation methods included problem identification, community socialization and forums, managerial training, reorganization deliberations, development of institutional documents, also mentoring and evaluation. The activity was carried out using a participatory-collaborative approach that actively involved the community in every stage. The results showed an increase in community awareness of the importance of village institutions, the formation of a new and more functional organizational structure, the preparation of standard operating procedures (SOPs) and annual work plans, as well as an improvement in the managerial capacity of the administrators, as reflected in the increase in average understanding scores from 56.3 to 80.1 (an increase of 42%). These findings confirm that a participatory-collaborative approach is effective in reactivating inactive BUMDes while building community commitment to program sustainability.

Keywords: BUMDes, collaborative, participatory, reorganization

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan mengoptimalkan potensi lokal desa. Namun, di berbagai daerah, termasuk Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, sejumlah BUMDes mengalami stagnasi kelembagaan yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi organisasi secara optimal. Salah satunya adalah BUMDes Tirta Kencana yang sempat tidak aktif karena lemahnya struktur organisasi dan manajemen. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengaktifkan kembali BUMDes tersebut melalui strategi penguatan kelembagaan berbasis reorganisasi dan penataan struktur organisasi. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi masalah, sosialisasi dan forum warga, pelatihan manajerial, musyawarah reorganisasi, penyusunan dokumen kelembagaan, serta pendampingan dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-kolaboratif yang melibatkan masyarakat secara aktif pada setiap tahap. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelembagaan desa, terbentuknya struktur organisasi baru yang lebih fungsional, tersusunnya SOP dan rencana kerja tahunan, serta peningkatan kapasitas pengurus yang tercermin dari kenaikan skor rata-rata pemahaman dari 56,3 menjadi 80,1 (peningkatan sebesar 42%). Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif-kolaboratif efektif dalam mengaktifkan kembali BUMDes yang tidak berjalan, sekaligus membangun komitmen masyarakat untuk keberlanjutan program.

Kata Kunci: BUMDes, kolaboratif, partisipatif, reorganisasi

Pendahuluan

Desa merupakan entitas penting dalam pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan nasional, desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang mampu mengelola potensi dan menentukan arah pembangunan secara mandiri. Salah satu strategi utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes hadir sebagai instrumen kelembagaan yang bertujuan mengelola potensi desa secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Utami et al., 2019).

Namun, pelaksanaan BUMDes di berbagai daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep dan realitas di lapangan. Banyak BUMDes yang secara administratif terbentuk, tetapi secara operasional tidak berjalan. Hal ini menjadi ironi, mengingat anggaran desa yang cukup besar telah dialokasikan setiap tahunnya. Menurut Thomas (2019), dari total anggaran Dana Desa yang mencapai ratusan triliun rupiah selama lima tahun terakhir, ribuan BUMDes tercatat tidak aktif. Permasalahan mendasar yang umum ditemui antara lain lemahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya pembagian tugas dalam struktur organisasi, rendahnya literasi manajerial pengelola, serta minimnya dukungan regulasi dan pendampingan yang berkelanjutan (Haryono et al., 2022; Sriyoto & Ifebri, 2023).

Kondisi ini juga mencerminkan situasi yang terjadi di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Cokro memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata berbasis sumber air (seperti Umbul Cokro) dan pertanian, terutama komoditas unggulan seperti padi varietas rojolele srinuk. Sayangnya, keberadaan BUMDes yang telah dibentuk di desa ini belum menunjukkan dampak

signifikan bagi perekonomian lokal. Kegiatan usaha desa tidak berjalan, struktur kelembagaan tidak aktif, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui peran dan eksistensi BUMDes yang ada. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten mencatat bahwa per tanggal 9 Juli 2025 terdapat 391 BUMDes di Kabupaten Klaten, namun hanya 58 BUMDes yang termasuk dalam kategori berkembang dan maju.

Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes bukan hanya membutuhkan modal finansial, tetapi juga penguatan dari sisi kelembagaan dan tata kelola. Keberhasilan BUMDes tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, serta adanya mekanisme pelaporan dan pengawasan yang akuntabel (Purnomo & Sumaryatiningsih, 2024). Kelembagaan yang kuat menjadi fondasi utama untuk mewujudkan BUMDes sebagai entitas ekonomi yang berdaya saing dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa.

Pendekatan yang diperlukan untuk mengatasi stagnasi kelembagaan BUMDes adalah melalui reorganisasi struktur organisasi, penyusunan ulang peran manajerial, serta pelatihan dan pendampingan berbasis kebutuhan. Upaya-upaya ini telah terbukti berhasil di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Desa Morome, Sulawesi Tenggara. Dalam kasus tersebut, penguatan kelembagaan melalui pelatihan partisipatif, restrukturisasi internal, dan kolaborasi multipihak mampu mengubah BUMDes yang tidak aktif menjadi entitas usaha desa yang mandiri dan produktif (Taufik et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bentuk intervensi langsung terhadap permasalahan kelembagaan yang dihadapi BUMDes Desa Cokro. Fokus utama dari program ini adalah melakukan reorganisasi struktur organisasi dan penataan kelembagaan BUMDes agar kembali aktif, fungsional, dan responsif

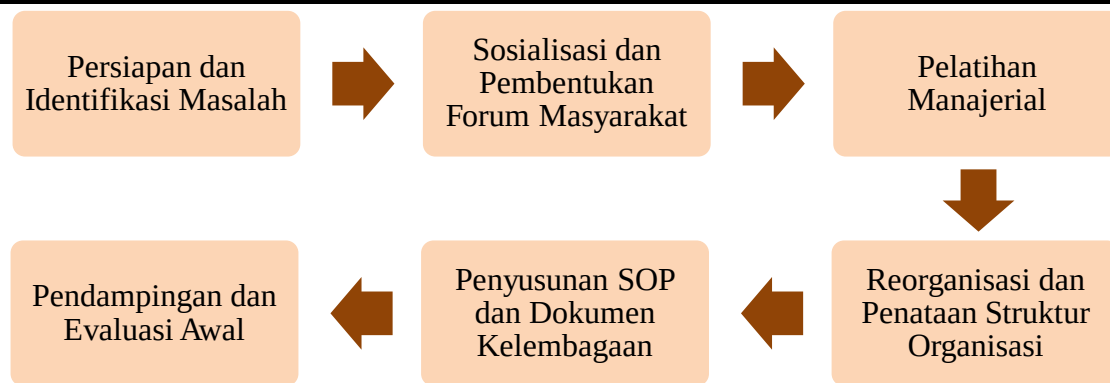
terhadap kebutuhan masyarakat. Reorganisasi dilakukan tidak hanya sebagai pembenahan administratif, melainkan juga sebagai proses transformasi kelembagaan yang mencakup aspek kepemimpinan, budaya organisasi, hingga sistem kerja yang lebih kolaboratif dan partisipatif.

Solusi yang ditawarkan kepada mitra dalam kegiatan ini adalah reorganisasi struktur organisasi BUMDes disertai penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajerial, pendampingan intensif, serta penyusunan dokumen kelembagaan. Pilihan solusi ini didasarkan pada temuan bahwa faktor utama yang menyebabkan stagnasi BUMDes bukan hanya keterbatasan modal, melainkan lemahnya tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia (Ibrahim et al., 2019). Reorganisasi diperlukan untuk memastikan adanya pembagian tugas yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, serta sistem kerja yang akuntabel. Selain itu, pelatihan dan pendampingan berfungsi sebagai sarana peningkatan literasi manajerial pengurus sehingga kelembagaan dapat berjalan lebih profesional. Pendekatan serupa terbukti berhasil mengaktifkan kembali BUMDes di berbagai daerah, misalnya di Desa Morome, Sulawesi Tenggara, melalui kombinasi restrukturisasi organisasi dan pelatihan partisipatif (Taufik et al., 2025), maupun di BUMDes “Berkah Alam Lestari” yang mampu meningkatkan efektivitas tata kelola melalui penataan kelembagaan berbasis partisipasi masyarakat (Naryatmojo et al., 2023). Dengan dasar tersebut, intervensi ini diyakini relevan dan tepat untuk menjawab kebutuhan BUMDes Tirta Kencana di Desa Cokro.

Melalui solusi tersebut, diharapkan terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola BUMDes di Desa Cokro, yang pada gilirannya dapat menjadi model bagi desa lain yang mengalami permasalahan serupa. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya memiliki dan mengelola BUMDes secara profesional. Dengan penguatan kelembagaan yang memadai, BUMDes tidak hanya akan menjadi pengelola aset desa, tetapi juga motor utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dengan peserta utama adalah pengurus dan calon pengurus BUMDes Tirta Kencana. Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif-kolaboratif, yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek aktif dalam proses penguatan kelembagaan. Model ini diyakini dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan memperkuat keberlanjutan program, khususnya dalam konteks penguatan kelembagaan BUMDes (Atuna & Harun, 2019). Tujuan utamanya adalah mereorganisasi struktur organisasi BUMDes dan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pendampingan langsung, pelatihan manajerial, dan penyusunan dokumen formal kelembagaan. Alur pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dimulai dengan koordinasi antara tim pengabdian dan Pemerintah Desa Cokro untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi aktual BUMDes Tirta Kencana. Adapun dokumentasi kegiatan pada tahap ini tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Identifikasi Masalah melalui Observasi dan Wawancara

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara informal dengan perangkat desa dan pengurus lama, diketahui bahwa BUMDes mengalami kondisi tidak aktif,

tanpa struktur organisasi yang berjalan. Situasi ini sejalan dengan fenomena stagnasi BUMDes di banyak daerah yang disebabkan oleh kelemahan manajerial dan ketidakteraturan organisasi (Haryono et al., 2022; Sriyoto & Ifebri, 2023).

Dari hasil identifikasi ini, tim menyusun peta masalah dan mengembangkan strategi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Desa Cokro. Selain itu, tim juga melakukan peninjauan terhadap dokumen legal BUMDes yang masih tersedia, seperti SK pembentukan, laporan kegiatan terdahulu, dan arsip administratif lainnya.

2. Sosialisasi dan Pembentukan Forum Masyarakat

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi program kepada warga dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan urgensi pengaktifan kembali BUMDes dan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi usaha desa yang profesional. Forum ini melibatkan unsur RT, RW, tokoh pemuda, dan perwakilan perempuan desa, serta perangkat desa dan pengurus BUMDes sebelumnya. Melalui forum ini, dibentuk pula kelompok kerja lokal yang bertugas mendampingi proses reorganisasi dari dalam komunitas. Pembentukan kelompok kerja ini menjadi bentuk kolaborasi antara tim pengabdian dan masyarakat yang sejalan dengan prinsip pemberdayaan berbasis komunitas (Atuna & Harun, 2019).

Dokumentasi kegiatan tersaji pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Masyarakat

3. Pelatihan Manajerial

Untuk meningkatkan kapasitas SDM BUMDes Tirta Kencana, diselenggarakan pelatihan manajemen organisasi desa dan pelatihan dasar kewirausahaan sosial. Materi pelatihan mencakup perencanaan strategis, pengambilan keputusan kolektif, pembagian tugas berbasis fungsi, serta pengelolaan aset dan keuangan desa. Kegiatan pelatihan disampaikan melalui metode ceramah interaktif, simulasi peran (*role-play*), diskusi kelompok, dan studi kasus. Materi pelatihan disesuaikan dengan konteks lokal, dan narasumber berasal dari akademisi bidang administrasi publik serta praktisi pendamping desa. Model pelatihan semacam ini telah terbukti efektif dalam membentuk pengelola BUMDes yang lebih profesional (Christi et al., 2022; Kasmad et al., 2022).

Untuk mengukur efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi mitra, dilaksanakan *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diberikan sebelum kegiatan pelatihan untuk mengetahui pemahaman awal peserta, sedangkan *post-test* dilakukan setelah pelatihan untuk mengevaluasi peningkatan kompetensi. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam menilai keberhasilan program pelatihan sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan pengabdian. Dokumentasi kegiatan pelatihan tersaji pada Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan Pelatihan Manajerial

4. Reorganisasi dan Penataan Struktur Organisasi

Setelah pelatihan selesai, dilakukan proses reorganisasi BUMDes Tirta Kencana melalui forum musyawarah desa khusus yang difasilitasi oleh tim pengabdian dan pemerintah desa. Dalam musyawarah tersebut, disepakati struktur organisasi baru yang lebih fungsional, dengan jabatan yang mencerminkan kebutuhan pengelolaan unit usaha BUMDes. Proses pemilihan pengurus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Struktur organisasi yang terbentuk kemudian diformalkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, disertai lampiran uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi. Pendekatan reorganisasi berbasis musyawarah ini terbukti mampu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap

kelembagaan desa (Naryatmojo et al., 2023).

5. Penyusunan SOP dan Dokumen Kelembagaan

Sebagai kelengkapan institusional, tim pendamping membantu pengurus BUMDes dalam menyusun dokumen resmi kelembagaan, seperti struktur organisasi, SOP internal, rencana kerja tahunan (RKT), dan peraturan operasional BUMDes. Penyusunan dilakukan melalui lokakarya kecil dengan metode kerja partisipatif, sehingga dokumen yang dihasilkan bersifat kontekstual dan mudah diimplementasikan. Dokumen ini disusun merujuk pada pedoman regulasi Kemendes serta studi best practices dari BUMDes yang telah berhasil secara kelembagaan (Ibrahim et al., 2019; Khosiah & Muhardini, 2019). Hasil penyusunan disahkan oleh Kepala Desa dan disimpan sebagai arsip resmi BUMDes Tirta Kencana.

6. Pendampingan dan Evaluasi

Kegiatan pengabdian ditutup dengan tahap pendampingan intensif dan evaluasi pelaksanaan struktur baru. Tim pengabdian melakukan kunjungan lapangan untuk mendampingi pengurus baru dalam menyusun agenda kerja dan melaksanakan fungsi manajerial harian. Selain itu, dilakukan evaluasi partisipatif melalui diskusi kelompok terfokus untuk mengetahui hambatan dan peluang yang muncul setelah reorganisasi.

Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan semangat kerja, kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, serta kesiapan pengurus dalam mengembangkan unit usaha baru. Metode partisipatif dan kolaboratif terbukti meningkatkan efektivitas kegiatan pengabdian dan memperkuat keberlanjutan program (Nugrahaningsih et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, telah dilaksanakan dengan fokus pada penguatan kelembagaan BUMDes Tirta Kencana melalui proses reorganisasi dan penataan struktur organisasi. Berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi lapangan, kegiatan ini menunjukkan sejumlah capaian positif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Kelembagaan

Salah satu hasil nyata dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keberadaan dan pengelolaan BUMDes. Pada saat sosialisasi awal, hanya sebagian kecil warga yang mengetahui fungsi dan tujuan BUMDes. Namun, setelah dilakukan forum diskusi, pelatihan, dan pembentukan tim kerja lokal, terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi warga, terutama dari kalangan pemuda dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap kelembagaan desa (Atuna & Harun, 2019; Pretty, 1995).

2. Sosialisasi dan Pembentukan Forum Masyarakat

Salah satu capaian penting dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya kembali struktur organisasi BUMDes Tirta Kencana yang sebelumnya tidak aktif dan tidak terdokumentasi secara formal. Proses reorganisasi dilakukan melalui musyawarah desa khusus yang difasilitasi oleh tim pengabdian bersama Pemerintah Desa Cokro, dengan mengundang tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan kelompok warga. Adapun dokumentasi kegiatan tersaji pada Gambar 5.



Gambar 5. Kegiatan Musyawarah Reorganisasi BUMDes

Dalam forum tersebut, disepakati penataan ulang kepengurusan dan pembagian peran secara umum, tanpa menekankan pada jabatan formal tertentu. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih jelas, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan operasional BUMDes. Pengurus yang baru terbentuk menunjukkan semangat dan komitmen untuk menghidupkan kembali aktivitas kelembagaan yang sempat terhenti. Selain itu, struktur yang terbentuk didasarkan pada prinsip kesesuaian fungsi, seperti pengelolaan usaha, administrasi, komunikasi masyarakat, dan keuangan. Meskipun belum sepenuhnya tertuang dalam format kelembagaan yang baku, penataan ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sistem organisasi yang lebih rapi dan profesional. Seluruh hasil musyawarah didokumentasikan dan dituangkan dalam notulen resmi untuk keperluan legalitas dan tindak lanjut administratif oleh pemerintah desa.

Langkah ini sejalan dengan rekomendasi dari Naryatmojo et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembentukan struktur kelembagaan yang partisipatif dapat meningkatkan efektivitas tata kelola dan membangun kepercayaan publik terhadap keberadaan BUMDes sebagai lembaga milik bersama.

3. Penyusunan SOP dan Dokumen Kelembagaan

Setelah reorganisasi, tim pengabdian bersama pengurus BUMDes berhasil menyusun dokumen kelembagaan dasar berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan struktur organisasi visual. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman kerja internal, tetapi juga menjadi prasyarat untuk menjalin kerja sama dan mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah desa atau mitra eksternal. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi dari Purnomo & Sumaryatiningsih (2024) yang menyatakan bahwa penguatan tata kelola BUMDes perlu diawali dengan kejelasan struktur dan dokumen formal kelembagaan.

4. Peningkatan Kapasitas Pengurus Melalui Pelatihan

Pelatihan manajerial yang diselenggarakan dalam kegiatan ini terbukti meningkatkan pemahaman dan keterampilan dasar para pengurus BUMDes Tirta Kencana, terutama dalam aspek perencanaan usaha, pengambilan keputusan berbasis musyawarah, dan tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*), diperoleh skor sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor *Pre-test* dan *Post-test*

Aspek	Skor
<i>Pre-test</i>	56,3
<i>Post-test</i>	80,1
Peningkatan	42%

Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang diterapkan, yaitu kombinasi antara ceramah interaktif, simulasi studi kasus, dan diskusi kelompok, mampu memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta. Capaian ini memperkuat temuan Christi et al. (2022), yang menyatakan

bahwa pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan pembelajaran kontekstual efektif dalam meningkatkan kapasitas manajerial pengelola usaha desa secara signifikan. Selain peningkatan skor, partisipasi aktif peserta dalam forum diskusi dan praktik lapangan juga meningkat, menunjukkan perubahan sikap dan kesiapan dalam mengelola BUMDes secara lebih profesional.

5. Terbangunnya Komitmen dan Rencana Tindak Lanjut

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan adalah adanya komitmen dari pengurus baru untuk melanjutkan pengelolaan BUMDes secara aktif. Beberapa rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan antara lain adalah identifikasi potensi unit usaha, pemetaan mitra strategis, serta pengembangan proposal usaha desa berbasis potensi lokal (misalnya pengelolaan air Umbul Cokro atau pengemasan produk lokal). Tim pengabdian juga menjalin kesepakatan untuk melakukan monitoring jarak jauh dan siap melakukan kunjungan lanjutan apabila dibutuhkan.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan BUMDes tidak cukup hanya melalui suntikan modal atau legalitas formal, tetapi harus dimulai dari aspek struktur organisasi, manajemen internal, dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan temuan Ibrahim et al. (2019), bahwa faktor penghambat utama BUMDes di Indonesia terletak pada aspek kelembagaan dan bukan semata-mata pada aspek modal.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun pondasi kelembagaan yang kuat bagi BUMDes Tirta Kencana. Langkah-langkah strategis yang dilakukan diharapkan dapat menjadi model replikasi bagi desa lain yang mengalami permasalahan serupa. Keberhasilan pelaksanaan program ini juga memperkuat pentingnya peran

kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan kalangan akademisi dalam menghidupkan kembali lembaga ekonomi desa.

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengaktifkan kembali kelembagaan BUMDes Tirta Kencana melalui pendekatan reorganisasi dan penataan struktur organisasi. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, sosialisasi, pelatihan manajerial, hingga pembentukan struktur organisasi baru dan penyusunan dokumen kelembagaan, terlaksana secara sistematis dan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa, terbentuknya struktur organisasi yang lebih fungsional, serta tersusunnya dokumen kelembagaan seperti SOP dan rencana kerja. Selain itu, peningkatan kapasitas pengurus tercermin dari hasil pelatihan manajerial yang menunjukkan peningkatan skor pemahaman sebesar 42%, serta tumbuhnya komitmen untuk mengelola BUMDes secara aktif dan berkelanjutan.

Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif, keterlibatan banyak pihak, dan pendampingan yang terstruktur merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat kelembagaan desa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model penguatan BUMDes di desa-desa lain yang mengalami permasalahan serupa, serta berkontribusi dalam membangun ekonomi lokal berbasis potensi desa secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada

Pemerintah Desa Cokro, Pokdarwis Tjakrawala, BUMDES Tirta Kencana, dan seluruh masyarakat Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang telah bekerja sama dan berkontribusi sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Atuna, R., & Harun, N. I. (2019). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan Tantangan Pemerintah Sumalata Timur. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 2(2), 61–77. <https://doi.org/10.32662/gj pads.v2i2.769>
- Christi, R. F., Diwest, D. J., & Wimala, W. (2022). Optimalisasi Kegiatan Kewirausahaan dalam Rangka Peningkatan UMKM, BUMDes, dan Koperasi di Wilayah Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(2), 375–381. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i2.11445>
- Haryono, D., Zakaria, W. A., Muniarti, K., & Indah, L. S. M. (2022). Pola Penguatan Kelembagaan Bumdes Ramaksa di Desa Sungai Langka Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Open Community Service Journal*, 01(02), 95–103. <https://doi.org/10.33292/ocsj.v1i2.10>
- Ibrahim, Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, & Mas'ad. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21(3), 349–354. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Kasmad, Lestari, A. W., & Cahyadi, E. (2022). Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan Bumdes Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa pada Bumdes Ciampea Udik Kecamatan Ciampea. *Dedikasi Pkm*, 3(3), 375–381. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v3i3.23981>
- Khosiah, & Muhardini, S. (2019). *Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes Mart Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. 4(5), 323–325. <https://doi.org/10.58258/jupe.v4i5.980>
- Naryatmojo, D. L., Kusumantoro, & Syarif, M. I. (2023). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalitas SDM BUMDES “Berkah Alam Lestari” Guna Mengembangkan Unit Bisnis Unggulan Berbasis Potensi Lokal Deby. *Abdimasku*, 6(2), 389–394. <https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.1034>
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., Zoraifi, R., & Hantoro, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran Digital pada BUMDes Bulukan Gemilang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8–14. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29574>
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Purnomo, H., & Sumaryatiningsih, S. (2024). Kapasitas Pengelola dalam Membangun Good Corporate Governace BUMDes Kalurahan Arta Tirta Mandiri, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 5(1), 24–37. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v5i1.724>
- Sriyoto, & Ifebri, R. (2023). Penguatan Kelembagaan BUMDes Desa Lokasi

Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*, 5(2), 14–20.

<https://doi.org/10.31317/jpmd.v6i1.833>

Taufik, Qomariyah, E., Puspitaningtyas, C., Mustafa, L. O., & Nasir, M. (2025). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan BUMDes melalui Pelatihan Partisipatif di Desa Morome, Sulawesi Tenggara. *Kongga: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 25–30. <https://doi.org/10.5243/kongga.v3i1.41>

Thomas, V. F. (2019). *Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?* Tirto.Id. <https://tirto.id/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah-enpb>

Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 498–508. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v11i2.21545>